

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, 2013, *Panduan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat*; Yogyakarta,
2. Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2005, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
3. Dayal, Radha *et. Al.*, 2007, *Restoring Rights to Women*, terj. Achie S. Luhulima, SMK Grafika Desa Putera, Jakarta
4. S., C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
5. Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung
6. Brownlie, Ian, 1993, *Dokumen-Dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia*, terj. Beriansyah, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
7. Puramdani, Chatarina, Hariti *et.al.*, 2000, *Hasil Lokakarya Perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta
8. Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

9. Soekanto, Soejono, Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta
10. Eddyono, Sri Wiyanti, 2004, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta
11. Sumardjono, Maria S. W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
12. Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung
13. Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

1. Asmarani, Anugriaty Indah, “Bias Gender sebagai Prediktor Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Psikologi*, Volume 35, Nomor 1, 2013
2. Widyastuti, A. Reni, “Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009

C. Internet

1. Komnas Perempuan, “15 Jenis Kekerasan Seksual”,
http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf,
diakses pada tanggal 15 Januari 2014
2. One Billion Raising Indonesia, “Fakta dan Angka Kekerasan Seksual”, http://www.obr-indonesia.org/2014/01/fakta-dan-angka-kekerasan-seksual/#identifier_0-714, diakses pada tanggal 17 November 2014
3. Mahadeva Wahyu Sugianto, “Angka Kekerasan terhadap Perempuan di DIY Tinggi”,
<http://m.sindonews.com/read/676923/22/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-di-diy-tinggi-1349332102>, diakses pada tanggal 17 November 2014
4. Katharina R. Lestari, “Tahun 2014 Diwarnai Darurat Kekerasan Seksual: CATAHU Komnas Perempuan”,
<http://indonesia.ucanews.com/2015/03/06/Tahun-2014-diwarnai-darurat-kekerasan-seksual-catahu-komnas-perempuan/>, diakses pada tanggal 6 April 2015
5. Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014”,
<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan->

- [CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf](#), pada tanggal 6 April 2015
6. UN Women Asia Pasific, “CEDAW Text Bahasa”, http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf, diakses pada 23 November 2014
 7. LBH APIK Jakarta, “Profil LBH APIK Jakarta”, <http://lbh-apik.or.id/profil-lbh-apik-jakarta.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.
 8. Komnas Perempuan, “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan”, <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/07/tragedi-mei-1998-dan-lahirnya-komnas-perempuan/>, diakses pada 16 Januari 2015
 9. Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani”, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses pada 15 Januari 2014

D. Konvensi Internasional

1. *Universal Declaration of Human Rights*
2. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*
3. Rekomendasi Umum Nomor 19 Sidang ke-11 Tahun 1992
4. *Declaration on the Elimination of Violence against Women*

5. Resolusi PBB No. 55/2

E. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.
10 Tahun 2007
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2012
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132
Tahun 2005
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun
2011
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun
2012
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun
2012

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun

2013